

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Atmadja, I.D.G (2013). *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press
- Ashsofa, B. (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Asikin, HZ (2016). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asyhadie, Z (2002) *Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Pemutusan Hubungan Kerja)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 140
- Asyhadie, Z (2008), *Hukum Kerja*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, S (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta
- Djoko Triyanto (2005), *Bekerja Di Kapal*, Bandung : Mandar Maju
- Hadjon, PM (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu : Surabaya
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Husni, L (2004). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Situmorang. B et al (2010) *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- Setiono (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS
- Soedarjadi (2008), *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Soekanto, S. & Mamuji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta
- Soepomo. (1985). *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke 7. Jakarta : Djambatan
- Sudarjadi (2010). *Kompilasi Hukum Kenegakerjaan Jamsostek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta; Alfabeta.

Sulaiman, A., & Walli, A. (2019). *Hukum ketenagakerjaan/perburuhan*. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. YPPSDM: Jakarta,  
Sulastomo (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta

**Peraturan dan perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

Undang-undang Nomor 15 tahun 2016 tentang pengesahan *Maritime Labour Convention* (MLC)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja

Peraturan Perundangan (PP) Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Perundangan (PP) Nomor 40 Tahun 2004

**Jurnal:**

Elvira, Soewita. S. & Salim, A. (2023). Tinjauan Yuridis Peraturan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*. 4(1).

Faizal A. (2016). Politik Hukum Perlindungan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*. 4(1). 13-15

- Gunardi (2005). Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Era Hukum*,1(1).
- Hadijah, Lieska, D. & Yusar. Y. (2021). Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Sebagai Syarat Kelaiklautan Dan Kesejahteraan Anak Buah Kapal Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*. 6(3).
- Liuswanto, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Yang Tidak Menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1308 K/Pdt.Sus-PHI/2017). *Jurnal Hukum Adigama*. 4(1).
- Netanyahu EK, Senewe EVT, & Anis FH (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Laut Dalam Pemutusan Hubungan Kerja. *Lex Administratum*. 8(5).
- Nola LF (2016), Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 7(1).
- Ony Surijono, Yulia A. Hasan, Basri Oner (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Pengusaha Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.dn.J. of Law 5(2).
- Prabawa, Heru, T. & Saputra. JA (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Pasal 395 KUH Dagang (Analisis Yuridis Putusan No. 614 K / Pdt. Sus-PHI / 2013). *Jurnal Hukum; Staatrechts* 4 (614).

**Internet:**

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221029/12/1592672/apa-itu-phk-ini-penyebab-aturan-jenis-dan-kompensasinya>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230322112123-4-423767/ini-besaran-pesangon-karyawan-phkberdasarkan-uu-cipta-kerja#:~:text=Ketentuan%20tersebut%20diatur%20dalam%20Pasal,dit>
- [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_522323/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_522323/lang--en/index.htm), diakses pada 23 Agustus 2023.